

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK, FUNGSI ARTIKULASI
DAN AGREGASI KEPENTINGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SUMATERA BARAT TAHUN 2019-2022**

***IMPLEMENTATION OF POLITICAL COMMUNICATION FUNCTIONS,
ARTICULATION FUNCTIONS AND AGGREGATION OF INTERESTS OF THE
GERAKAN INDONESIA RAYA PARTY, WEST SUMATRA 2019-2022***

Danisa Luthfi Azura¹, Indah Adi Putri, Andri Rusta³

¹²³Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

danisaluthfiazz2401@gmail.com, indahputri1981@gmail.com, arusta@soc.unand.ac.id

ABSTRAK :Saat ini pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai belum berjalan dengan baik di Indonesia dan harus adanya penyelenggaraan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan akan mencapai partai politik yang terintegrasi, transparan, dan modern melalui penerapan unsur komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tipe studi kasus didukung dengan penyebaran kuisioner. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah teori fungsi partai oleh Gabriel Almond. Dari hasil penelitian ini bahwa komunikasi yang terbentuk di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri yaitu pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Partai Gerindra memiliki keunikan karena masyarakat Sumatera Barat yang sangat mengidolakan sosok Prabowo Subianto sehingga pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra akan langsung dilaksanakan tanpa melalui mekanisme rapat dan mekanisme keputusan ketua DPD Partai Gerindra. Sedangkan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang terbentuk adalah masyarakat Sumatera Barat sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan yang dapat dilihat dalam kegiatan yang dimanfaatkan oleh DPD Partai Gerindra di ruang publik melalui acara adat yang diselenggarakan dalam rangka penguatan keberlangsungan komunikasi politik maupun dalam kegiatan ini mereka menyisipkan berita politik guna penampungan aspirasi masyarakat agar diterukan ke pembuatan kebijakan, sehingga dapat tercipta keberlangsungan politik yang terlaksana dengan baik dan menciptakan keselarasan hidup antar masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh, tujuan penelitian yang ingin dicapai sudah terjawab yaitu pelaksanaan fungsi partai oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Barat terkait fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sudah sesuai dengan Teori Fungsi Partai Gabriel Almond pasca Pemilihan Umum tahun 2019-2022 dengan proses perbaikan yang terus dilaksanakan.

Kata Kunci: Partai Politik, Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

ABSTRACT :Currently, the implementation of the party's political communication function has not gone well in Indonesia and the implementation of the political communication function, articulation and interest aggregation functions will achieve an integrated, transparent and modern political party through the application of political communication elements, articulation and interest aggregation. The research method used in this research is a qualitative approach of case study type supported by distributing questionnaires. The theory used to discuss this research is the theory of party function by Gabriel Almond. From the results of this study that the communication formed in DPD Gerindra Party West Sumatera has its own characteristics, namely the implementation of the political communication function of DPD Gerindra Party is unique because the people of West Sumatera idolize the figure of Prabowo Subianto so that the message conveyed by the General Chairperson of the Gerindra Party will be directly implemented without going through the meeting mechanism and the decision

mechanism of the chairman of DPD Gerindra Party. Meanwhile, the function of articulation and aggregation of interests formed is that the people of West Sumatera highly uphold the value of kinship which can be seen in the activities utilized by the Gerindra Party DPD in the public space through traditional events organized in order to strengthen the sustainability of political communication and in this activity they insert political news for the collection of community aspirations to be submitted to policy making, so as to create political sustainability that is well implemented and creates harmony of life among the people of West Sumatera. Based on the data that researchers have obtained, the research objectives to be achieved have been answered, namely the implementation of party functions by the DPD Gerindra Party of West Sumatera regarding the political communication function, articulation function and interest aggregation is in accordance with Gabriel Almond's Party Function Theory after the 2019-2022 General Election with a continuous improvement process.

Keywords: Political Party, Political Communication Function, Articulation Function and Interest Aggregation

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya demokrasi, partai politik menjadi satu hal penting dalam pemilihan umum sehingga disebut sebagai komponen politik yang paling ampuh dalam dinamika politik untuk mencapai tujuan politik. Sehingga, partai politik menempati pilar utama penyangga demokrasi yang mana tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah organisasi yang stabil dengan tujuan mengambil dan mengendalikan pemerintah untuk pemimpin agar memberikan anggotanya keuntungan yang ideal dan material. Partai politik tidak hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, legislatif memiliki kewajiban untuk dapat membela kepentingan konstituennya.

Menurut Miriam budiarjo, terdapat empat macam peran partai politik, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana perumusan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen dan kemungkinan berpotensi konflik.

Dalam menjalankan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik bergantung pada komunikasi politik. Oleh karena itu komunikasi politik menyentuh semua aspek sistem politik. Komunikasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik adalah gagasan yang mendasari pemikiran yaitu artikulasi kepentingan. Proses menampung, mengubah, dan meliputi aspirasi politik masyarakat berupa tuntutan dan dukungan menjadi alternatif kebijakan publik berupa kebijakan dan keputusan merupakan fungsi agregasi kepentingan.

Fungsi komunikasi politik perlu diteliti karena partai politik memiliki peran dalam mengarahkan pembuatan kebijakan, di mana banyak individu atau kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan sebelum suatu kebijakan ditetapkan dan diharapkan dari politik yang didapat dari penyampaian aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aspirasi masyarakat akan

diakomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen karena ini merupakan salah satu fungsi partai politik dalam menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan sangat tergantung pada komunikasi politik, namun saat ini banyak partai politik yang gagal menerapkan mekanisme informasi atau pesan politik dari pemerintah yang berupa kebijakan (*policy*) atau keputusan (*decision*) yang diharapkan sampai kepada masyarakat melalui perantara partai politik hingga menjadi hilang arah dan tujuannya. Pelaksanaan fungsi komunikasi politik dalam menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran komunikasi politik merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan harapan.

Partai Gerindra sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Sumatera Barat tentu memiliki tanggungjawab besar juga untuk melaksanakan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pasca pemilihan umum 2019. Kemampuan menjalankan fungsi komunikasi politik, artikulasi dan agregasi dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024 nantinya. Melalui komunikasi politiklah terjadi transfer informasi, ide, dan gagasan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengelola negara bersama-sama dan bergerak kearah lebih baik.

Penelitian ini dilatar belakangi karena sudah selayaknya partai-partai politik di Indonesia terutama di Sumatera Barat menjalankan fungsi politiknya agar negara ini dapat beranjak menuju kemajuan khususnya Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat mengharapkan agar partai politik dapat menjalankan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dapat menunjang keberhasilan sebuah negara. Tetapi pada kenyataannya partai politik menjalankan fungsi yang berbeda, pelaksanaan komunikasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik tidak lagi dirasakan dengan baik oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat.

Fungsi partai pasca Pemilihan Umum karena demokrasi menjadi sangat penting setelah Pemilihan Umum selesai, bukan saat pencoblosan/Pemilihan Umum. Pada dasarnya sistem politik yang demokratis terdapat gagasan, ide, dan nilai ketika fungsi partai politik sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan teori para ahli, maka akan berimplikasi kepada sistem politik yang lebih demokratis. Fungsi komunikasi politik yang baik perlu dijalankan karena partai politik menjadi sebuah wadah yang digunakan oleh warga negara sebagai sarana berpartisipasi kedalam pengelolaan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Komunikasi DPD Partai Gerindra Sumatera Barat pada tahun 2019-2022 menarik untuk diteliti karena Partai Gerindra menjadi partai dominan yang banyak mendapatkan perolehan kursi di Sumatera Barat saat pemilihan legislatif tahun 2019.

Sebagai salah satu partai dominan Gerindra harus memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dan fungsi politik kepada pemerintah maupun masyarakat di Sumatera Barat tidak hanya menjelang Pemilihan Umum, melainkan juga pasca Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Sumatera Barat tentu memiliki tanggungjawab besar pula untuk melaksanakan fungsi komunikasi, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pasca Pemilihan Umum 2019 dengan

baik. Kemampuan menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024 nantinya.

Pada beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan pelaksanaan fungsi komunikasi partai saat ini belum berjalan dengan baik di Indonesia. Tidak banyak penelitian ilmiah yang mengkaji pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi pasca Pemilihan Umum. Di Indonesia khususnya di Sumatera Barat komunikasi politik kurang dikelola dengan baik pasca Pemilihan Umum 2019. Aspirasi dan kepentingan massa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan karena parpol tidak melakukan fungsi intermediasi secara maksimal saat ini.

Kini masyarakat tidak lagi memiliki keyakinan terhadap partai politik yang ada dalam kehidupan sosial dan politik. Representasi yang seharusnya dilakukan partai politik untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat tidak berjalan. Saat ini partai hanya sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan menjelang Pemilihan Umum dibanding mengatur pola hubungannya dengan konstituen yang telah mengantarkan mereka menuju kekuasaan setelahnya.

Proses pengabaian ini secara lambat telah merusak eksistensi partai politik. Bagi masyarakat, partai politik gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Tidak dilaksanakannya beberapa fungsi oleh partai politik membuat kepercayaan rakyat ke partai politik menurun drastis.

Penelitian ini menggunakan teori dari Gabriel Almond struktural fungsional yang menjelaskan terdapat tiga konsep untuk mengkaji sistem politik dan kepartaian yaitu sistem, struktur dan fungsi. Dalam teori struktural fungsional, terdapat fungsi-fungsi tertentu yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup sistem politik yang bersangkutan yaitu fungsi *input* dan *output*. Fungsi utama yang diakses melalui fungsi input adalah fungsi komunikasi politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Gerindra Sumatera Barat

1. Sumber Komunikasi Politik DPD Partai Gerindra

Komunikasi politik dapat dilaksanakan dengan penetapan sumber komunikasi politik/komunikator. Pada dasarnya seorang anggota partai dapat berperan menjadi komunikator ketika ia menginformasikan sesuatu mengenai politik pada orang lain. Dalam komunikasi politik yang terjadi saat ini, suatu lembaga biasanya memiliki juru bicara yang secara fungsi dapat mewakili lembaganya dan menjadi juru bicara, humas atau *public relation*. Biasanya dalam suatu organisasi modern terdapat juru bicara agar informasinya utuh, jelas, dan tidak simpang siur. Tetapi yang terjadi di DPD Partai Gerindra bahwa seluruh anggota partai dapat menjadi komunikator guna membangun citra partai.

Sumber komunikasi atau komunikator dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat adalah seluruh pimpinan serta pengurus partai baik dari tingkat DPP sebagai tingkat yang lebih atas, pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Barat hingga pengurus tingkat PAC di ranting-ranting cabang. Tetapi komunikator utama tetap Ketua DPD Partai Gerindra yaitu Andre Rosiade.

Komunikasi politik di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan melalui pimpinan partai berupa pesan politik yang harus disampaikan kepada para anggota dan dibawah perintah Ketua Umum Partai yang bersifat komando karena pimpinan Partai Gerindra merupakan mantan anggota komando. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Gerindra memiliki keunikan yaitu pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum partai yaitu Prabowo harus diikuti walaupun tidak melalui mekanisme rapat, mekanisme keputusan ketua DPD Partai Gerindra. Karena Prabowo Subianto menjadi seorang yang menjadi *icon* gerindra dan panutan masyarakat Sumatera Barat. Komunikasi itu berisi sosialisasi peraturan, tata tertib partai, ideologi partai, perintah atasan yang berasal dari DPP kepada DPD, DPC ataupun PAC sebagai bawahannya.

Pelaksanaan komunikasi Partai Gerindra dilakukan melalui proses pencitraan ketua umum partai yaitu Prabowo Subianto. Konsep pencitraan dicetuskan oleh ketua umum Gerindra sendiri adalah Prabowo Subianto yang mana citranya telah terbangun di masyarakat Sumatera Barat. Pencitraan tersebut adalah pemimpin yang demokratis, berwibawa dan bersahaja. Sehingga pencitraan yang baik dari pemimpin partai membuat Ketua DPD dapat mudah diterima pesannya oleh pengurus dan anggota partai bahkan oleh masyarakat umum.

2. Pesan yang Disampaikan dalam Komunikasi Politik DPD Partai Gerindra Sumatera Barat

Pelaksanaan komunikasi politik tidak lepas dari terdapatnya pesan yang ingin disampaikan oleh partai politik. Pesan yang disampaikan merupakan perintah yang diberikan oleh pimpinan partai, larangan dan program kerja partai yang harus disampaikan kepada anggotanya. Melalui pesan yang diberikan tersebut diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat.

Pesan yang ingin disampaikan yang adalah perintah yang diberikan oleh ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat kepada anggota dan pengurus partai. Salah satu perintah yang diberikan dalam melaksanakan komunikasi politik adalah pesan yang ingin disampaikan Partai Gerindra kepada masyarakat harus ramah, santun dan mengutamakan aspirasi masyarakat. Karena melalui komunikasi politik yang baik dapat memperlihatkan proses demokrasi yang baik tanpa harus saling bertikai. Pesan yang didapat berasal dari rapat rapat yang dilakukan seperti Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi cabang, Rapat Koordinasi Daerah dan rapat kerja lainnya.

Perintah yang diberikan ketua DPD partai selalu berupaya memberikan kejelasan informasi mengenai Partai Gerindra secara baik dan tidak membuat misskomunikasi. Penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami telah dilakukan oleh ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Barat melalui perintah yang diberikan ketua DPD partai cukup dimengerti oleh pengurus dan anggota partai serta sebagian masyarakat.

Perintah larangan yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat merupakan penyampaian larangan bagi pengurus dan anggota partai dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan arahan ketua dan menyebarkan informasi yang tidak baik dan mengancam keberlangsungan partai. Perintah larangan bagi kader DPD Partai Gerindra Sumatera Barat saat ini terpelihara dengan baik jarang ada tindakan protes, demo maupun tindakan penentangan lainnya terhadap pimpinan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.

Partai Gerindra dalam memberikan pesan politik, dicari terlebih dahulu isu apa yang berkembang dimasyarakat. Sehingga dicari tahu solusi yang dibuat untuk mengatasi segala

permasalahan. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat pada pemilihan umum, partai politik menawarkan tidak saja calon-calon yang dinilai ahli untuk jabatan publik di legislatif dan eksekutif tetapi juga alternatif kebijakan (program) untuk merespon aspirasi dan tuntutan berbagai kelompok masyarakat.

3. Saluran yang Digunakan dalam Komunikasi Politik DPD Partai Gerindra

Komunikasi politik memiliki saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan politik dari komunikator politik kepada khalayak yang akan dituju. Saluran merupakan orang yang menggunakan alat untuk saling tukar menukar pesan, yang harus lebih diutamakan adalah manusianya sendiri didalam komunikasi politik. Komunikasi politik di tingkat DPD Partai Gerindra Sumatera Barat merupakan bagian dari komunikasi politik yang terjadi di Partai Gerindra, yaitu suatu proses penyampaian pesan dari pimpinan tingkat DPD kepada DPC atau anggota sebagai bawahan melalui proses komunikasi politik.

Pelaksanaan komunikasi politik tersebut dilakukan dengan lisan ataupun tulisan dengan menggunakan media, baik elektronik maupun cetak untuk mencapai suatu tujuan partai yang telah ditentukan bersama. DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan komunikasi guna menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat sehingga dapat diperjuangkan aspirasi tersebut di parlemen tidak memilih media atau fokus pada satu media saja, tetapi mencakup keseluruhan media agar terciptanya efisiensi penyampaian program dan tujuan partai terhadap masyarakat.

Saluran komunikasi massa di partai politik terdiri dari dua bentuk, pertama komunikasi tatap muka, yaitu ketika seorang berbicara di depan umum. Komunikasi yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra melalui tatap muka dilakukan saat reses, blusukan, sosialisasi dan menjadi relawan. Sedangkan bentuk komunikasi massa dengan menggunakan perantara yang ditempatkan di antara komunikator dan khalayak seperti media, teknologi, sarana dan alat komunikasi lainnya. Beberapa saluran komunikasi massa yang digunakan pada komunikasi DPD Partai Gerindra diantaranya adalah kampanye terbuka, media massa, media sosial, media luar ruang (baliho/poster) dan koran.

DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik dalam memaksimalkan fungsi dari media. Seperti usaha yang selalu dilakukan Partai Gerindra agar selalu dapat diingat oleh khalayak dengan melakukan bantuan dan spanduk atau baliho tidak saat masa kampanye saja. Hal ini melihat bahwa Partai Gerindra selalu berusaha melakukan pendekatan pada masyarakat, agar selalu di ingat dan terlihat selalu muncul di permukaan meskipun bukan dalam masa kampanye. Hal ini menjadi kelebihan Partai Gerindra Sumatera Barat yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh partai lain di Provinsi Sumatera Barat.

4. Khalayak Politik

Dalam komunikasi politik, khalayak adalah pihak yang dijadikan tujuan untuk menyampaikan suatu pesan politik. Pihak ini biasa disebut dengan penerima (receiver) dan khalayak (audience). Pihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan disebut sebagai penerima (receiver), atau khalayak (audience), atau komunikan. Khalayak yang menerima pesan akan memprakarsai penyampaian suatu pesan berikutnya, maka pada saat itu sebenarnya pihak yang tadinya disebut sebagai khalayak itu telah berubah peran menjadi komunikator.

Pesan komunikasi politik DPD Partai Gerindra Sumatera Barat diberikan kepada anggota partai dan masyarakat umum. Sasaran pendengar dalam komunikasi politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Gerindra adalah masyarakat agar dapat menyalurkan aspirasi

mereka sehingga diharapkan oleh partai agar tetap dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada Partai Gerindra pada Pemilihan Umum 2024 nantinya.

Sasaran yang ditentukan adalah para masyarakat yang target aktivitasnya dalam penyampain pesan politik oleh partai politik sehingga memilih Partai Gerindra agar menyalurkan aspirasinya. Karena pesan yang ingin disampaikan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat adalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pesan yang disampaikan dengan baik dapat membuat masyarakat berkenan untuk memilih partai dan mempercayai penyaluran suara mereka ke Gerindra.

5. Umpan Balik dari Komunikasi Politik yang Dilakukan DPD Partai Gerindra

Komunikasi merupakan proses yang rumit sehingga dalam rangka menyusun strategi komunikasi di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat diperlukan satu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Umpan balik yang ditimbulkan dari terjadinya komunikasi politik oleh DPD Partai Gerindra berupa penerimaan yang positif dan negatif dari masyarakat maupun anggota partai. Namun penerimaan ini tidak terlepas dari upaya komunikator sebagai penyampai pesan dalam menyampaikan pesan politik agar tidak terjadi miskomunikasi di DPD Partai Gerindra.

Berdasarkan hasil observasi banyak masyarakat Sumatera Barat yang memilih Partai Gerindra pada Pemilihan Umum dan masuk menjadi anggota Partai Gerindra dikarenakan proses komunikasi yang cukup baik dari Partai Gerindra Sumatera Barat. Anggota DPD Partai Gerindra Sumatera Barat merupakan kader partai terbanyak dan paling banyak peminatnya di Sumatera Barat dikarenakan Prabowo Effect. Penerimaan yang baik akan menciptakan partisipasi yang baik pula dari masyarakat.

Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat

Partai politik merupakan alat bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat pada umumnya karena sangat berkaitan sekali dengan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek dari aturan.

Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Karena seluruh aspirasi masyarakat akan di akomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen. Fungsi komunikasi politik partai politik sangat vital untuk menyampaikan hal-hal yang sangat mendesak dari kebijakan pemerintah misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan berbagai aturan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Tahapan proses komunikasi politik DPD Partai Gerindra melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada saat ini, ada beberapa tahap pengerjaannya. Pada tahap *pertama*, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra menghimpun setiap aspirasi masyarakat melalui reses dan dituangkan dalam bentuk laporan pada daerah pemilihan anggota dewan masing-masing. Penginputan aspirasi dilakukan dalam satu tahun sekali yang disebut dengan usulan pokok pokok pikiran anggota DPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan dari usulan masyarakat di daerah pemilihan masing masing serta hasil kunjungan kerja komisi masing-masing anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan sering disebut sebagai reses.

Ketika Partai Gerindra melakukan reses ke lapangan dengan mengadakan pesta adat dengan bentuk komunikasi dengan melalui lomba gandang-gandang tasa yang dilaksanakan

oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra yaitu Jempol dengan menyisipkan berita politiknya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adat yang sampai saat ini dipercayai dan kental dalam kehidupan demokrasi masyarakat Sumatera Barat memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai ajaran Islam dari warisan turun temurun, yang dikenal dengan semboyan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Dalam kehidupan berdemokrasi didapati bahwa masyarakat Sumatera Barat sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan yang dapat dilihat dalam kegiatan yang dimanfaatkan oleh DPD Partai Gerindra di ruang publik melalui acara adat yang diselenggarakan dalam rangka penguatan keberlangsungan komunikasi politik maupun dalam kegiatan ini mereka menyisipkan berita politik guna penampungan aspirasi masyarakat agar diteruskan ke pembuatan kebijakan, sehingga dapat tercipta keberlangsungan politik yang terlaksana dengan baik dan menciptakan keselarasan hidup antar masyarakat Sumatera Barat.

Kedua, laporan dari hasil reses diseleksi menjadi usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang akan disampaikan pada rapat paripurna dan kemudian diteruskan ke eksekutif untuk dilakukan pensinkronan sesuai dengan RPJMD dan RPJD. Ketiga, selanjutnya aspirasi tersebut diteruskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu tahun sebelum tahun anggaran harus dilakukan penginputan aspirasi masyarakat lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD ini digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan agar memiliki dukungan penyusunan kebijakan yang lebih aktual dan komprehensif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendaliannya, evaluasi program dengan menggunakan sistem informasi daerah.

Keempat, aspirasi yang terealisasi dikomunikasikan kepada anggota DPRD dan disosialisasikan kembali ke masyarakat. Adanya rangkaian dan mekanisme yang panjang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengharuskan anggota DPRD memiliki kemampuan komunikasi yang lebih. Kuatnya komunikasi yang terbangun tersebut belum diimbangi dengan kuatnya komunikasi yang terbangun antara partai politik dengan masyarakat atau anggota dewan dengan masyarakat.

Kuatnya keterkaitan antara partai politik dengan anggota dewannya mengharuskan terjalannya kerjasama yang baik antara keduanya berupa komunikasi politik secara timbal balik agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang muncul di kalangan publik. Komunikasi politik memiliki peranan penting bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya dari DPD Partai Gerindra. Sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat, dipilih berdasarkan daerah pemilihan, anggota DPD Partai Gerindra yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus turun ke masyarakat untuk menjemput, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap aspirasi masyarakat yang diamanahkan.

Salah satunya anggota DPRD Sumatera Barat yaitu Jasma Juni melakukan reses di daerah Kabupaten Pariaman dan Kota Pariaman. Dalam reses ini masyarakat meminta agar dibuatkan jalan di desa mereka yaitu Kabupaten Pariaman. Sebagai wujud pertanggungjawaban secara moral, DPRD dari Partai Gerindra melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diamanatkan kepadanya. Komunikasi menjadi titik utama perjuangan ketika anggota DPRD dituntut untuk bisa mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh masyarakat yang setelah itu diperjuangkan secara politik pada agenda lain.

Peranan partai politik yang sangat besar mendorong anggota dewan untuk lebih pasif dan menunggu instruksi dari partai politik. Bukan tanpa alasan, aspirasi masyarakat yang telah ditampung tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota dewan. Mereka harus menunggu

kebijakan dari partai politik sehingga tidak semua aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan dapat dilaksanakan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat maka disimpulkan:

1. Pada pelaksanaan komunikasi politik, DPD Partai Gerindra Sumatera Barat pasca Pemilihan Umum 2019 terindikasi melanjutkan dan mempertahankan komunikasi politiknya mulai dari melalui kader-kadernya hingga ketingkat paling rendah yaitu jorong. Dalam komunikasi politik DPD Partai Gerindra Sumatera Barat dengan masyarakat, para pengurus dan kader partai yang melakukan komunikasi dengan masyarakat secara intensif.
2. Pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Partai Gerindra memiliki keunikan karena masyarakat Sumatera Barat yang sangat mengidolakan sosok Prabowo Subianto sehingga pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra akan langsung dilaksanakan tanpa melalui mekanisme rapat dan mekanisme keputusan ketua DPD Partai Gerindra
3. Pelaksanaan artikulasi dan agregasi kepentingan juga berjalan sesuai dengan sistematis. Dimulai dari anggota legislatif yang melakukan kegiatan reses guna menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya selanjutnya baru dilaksanakannya membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan dan mesosialisasikan Kembali hasil dari proses agregasi kepentingan. Pembangunan industri pariwisata.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Almutahar, L. (2016). Pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur. *Jurnal Aspirasi Ilmu Politik*, 7-9.
- Ardial. (2009). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Bauw, A. (2013). Peranan Partai Politik Dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia (Kajian Undang-Undang 2 Tahun 2011). *Legal Pluralism Vol. 3 No. 1*, 48.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kristin. (2018). Fungsi Komunikasi Politik dalam Membangun Masyarakat Madani: Studi Kasus di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kota Kupang. *Jurnal Aspirasi Ilmu Politik Vol. 8 No. 2*, 1-4.
- Hafied, C. (2009). *Komunikasi Politik-Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida, H. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Irmansyah. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No.3*, 375.
- Iskandar, D. (2016). Keberadaan Partai Politik yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1*, 34-37.
- Kundumuya, A. (2013). Dampak Agregasi Kepentingan Politik terhadap Kinerja Lembaga. *Jurnal Ilmu Politik e-Journal Unsrat Vol. 2 No. 1*, 2-5.

- Maarontong, J. (2015). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik. *Jurnal Politico Vol. 2 No. 6*, 12-20.
- Nasir, N. (2016). Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen. *Jurnal Politik Proferik Vol. 4 No. 1*, 3-5.
- Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal TAPIs Vol. 8 No. 1*, 145-147.
- S, S. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Di Desa Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. *Pancasila and Civic Education Repository Umsu*, 15-33.
- Saebani, H. A. (Bandung). *Metode Penelitian Kualitatif*. 2012: CV Pustaka Setia. .
- Saputro, U. H. (2021). Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan pada Masa Pandemi Covid-19. *e-Journal Ilmu Politik UIN Sunan Ampel*, 1-5.
- Shahreza, M. (2020). Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik. *INA-Rxiv*, 15-18.
- Solihin, O. (2018). Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilihan Umum 2009. *Jurnal Agregasi FISIP UNIKOM Vol. 6 No. 1*, 4-7.
- Stoker, D. M. (2017). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Subakti, R. (1997). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Raja Grasindo.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, R. S. (2015). Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan e-Journal Undip*, 6-15.
- Wiryanto. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia